

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan I - 2 Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Coblong Tahun 2019-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dipengaruhi adanya peraturan baru yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penanganan Covid - 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang perlu diakomodir dalam RPJMD, perlunya penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dalam Penyelarasan Target Indikator makro serta Penyelarasan Program Prioritas, terjadinya pandemi Covid 19 yang berdampak pada perekonomian dan tatanan sosial masyarakat.

Perubahan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 8) Peraturan Daerah Kota Bandung No.11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah No.3 Tahun 2019 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kecamatan Coblong tahun 2018-2023 disusun karena adanya perubahan peraturan baru yang perlu diakomodir dalam RPJMD dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Coblong dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Coblong Tahun 2018-2023 dan Renja Kecamatan Coblong Tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan Kecamatan Coblong dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- 2) Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan Kecamatan Coblong terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Coblong Kota Bandung 2018-2023 disusun sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2018-2023 dan sistematika penulisan

#### **BAB II            GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat

Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Reviu Renstra Perangkat Daerah;

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Perangkat Daerah dan penentuan isu-isu strategis;

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat penjabaran tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah yang hendak dicapai.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sedangkan Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif;

**BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Coblong

Kecamatan Coblong Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 14 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang lainnya. Kecamatan Coblong dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

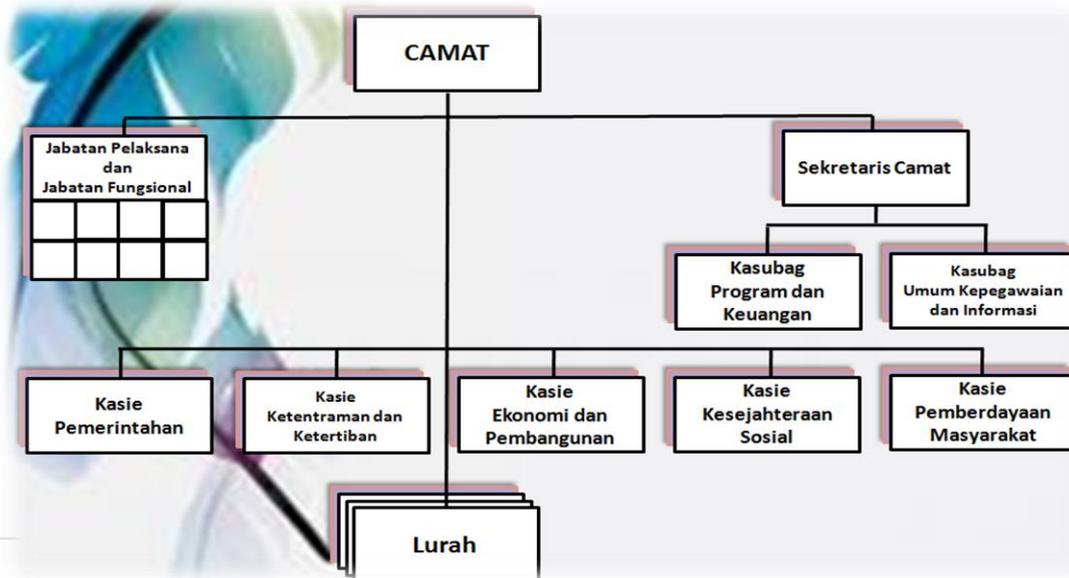
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahannya, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat, ditetapkan juga Peraturan Walikota Nomor 213 Tahun 2018 tentang pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung, susunan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Coblong Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :

#### A. CAMAT

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

- Uraian Tugas :
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;

6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan

- pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
  7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
  8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
  9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
  10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
  13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;

14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan; Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah,

- Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
25. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
  26. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
  27. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  28. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **B. SEKRETARIS KECAMATAN**

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.

- Uraian Tugas :
1. melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  4. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
  5. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan. Sekretariat dan Kecamatan;
  6. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  7. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;

8. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
9. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
10. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
11. melaksanakan pelayanan informasi publik;
12. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
13. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
14. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
15. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
16. melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
17. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
18. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan; melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
19. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DATA DAN INFORMASI**

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

- Uraian Tugas :
1. menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan
  4. Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  5. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  6. menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  7. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
  8. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
  9. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
  10. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
  11. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
  12. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
  13. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
  14. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;

15. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
16. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
17. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
18. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
19. melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
20. melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
21. menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
22. melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan,
23. pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
24. menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
25. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;

26. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
27. memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
28. menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
29. menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk
30. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
31. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
32. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
33. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
34. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
35. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
36. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
37. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
38. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
39. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### D. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

- Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan
- Uraian Tugas :
1. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  4. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;
  5. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  6. melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  8. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
  9. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;

10. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
11. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
12. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
13. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
14. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
15. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
16. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
17. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
18. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
19. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
20. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
21. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
22. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**E. SEKSI PEMERINTAHAN**

- Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.
- Uraian Tugas :
1. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  4. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
  5. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  6. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan
  7. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
  8. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian
  9. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan
  10. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
  11. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
  12. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

13. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
14. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;
15. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
16. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
17. melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
18. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
19. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban

- Uraian Tugas :
1. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi
  2. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat
  3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan
  4. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk
  5. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan
  6. menyusun data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
  7. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
  8. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
  9. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
  10. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;

11. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
12. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
13. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
14. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
15. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
16. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
17. melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
18. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
19. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **G. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Tugas Pokok : melaksanakan Sebagian Tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial

- Uraian Tugas :
1. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
5. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
6. menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
7. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
8. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
9. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
10. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
11. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
12. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
13. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
14. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
15. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
16. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,

dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

17. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **H. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan

- Uraian Tugas :
1. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  4. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
  5. menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
  6. memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  7. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
  8. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik/fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  9. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
  10. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
  11. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
  12. mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;

13. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
14. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
15. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
16. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
17. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **I. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Uraian Tugas :
1. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  4. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
  5. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;

6. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
7. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
8. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
9. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
10. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
11. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
12. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
13. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
14. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Kecamatan Coblong**

Kecamatan Coblong merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. Batas wilayah Kecamatan Coblong terakhir berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Adapun batas wilayah Kecamatan Coblong adalah sebagai berikut:

- ✚ Sebelah Utara : Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung dan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
- ✚ Sebelah Timur : Kecamatan Cibeuying Kaler
- ✚ Sebelah Selatan : Kecamatan Bandung Wetan
- ✚ Sebelah Barat : Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Cidadap

Gambar 2.2  
Peta Kecamatan Coblong



Wilayah administrasi Kecamatan Coblong Kota Bandung terbagi menjadi 6 Kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 76 Rukun Warga (RW) dan 467 Rukun Tetangga (RT).

**Tabel 2.1**  
**Jumlah RT/RW**

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Kelurahan Cipaganti.	7	52
2.	Kelurahan Lebak Siliwangi.	6	23
3.	Kelurahan Lebak Gede.	13	64
4.	Kelurahan Sadang Serang.	21	130
5.	Kelurahan Sekeloa	16	93
6.	Kelurahan Dago	13	105
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>467</b>

Kecamatan Coblong terletak di wilayah tengah utara Kota Bandung, secara astronomis Kecamatan Coblong terletak di antara 6°56'24" (6,941237°) Lintang Selatan dan 107°35'48" (107,596611°) Bujur Timur. Secara geografis Kecamatan Coblong berbatasan dengan wilayah Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, memiliki luas wilayah seluas 743,3 Ha. Secara administratif terbagi atas 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Cipaganti, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kelurahan Sadangserang, Kelurahan Sekeloa, Kelurahan Lebak Gede dan Kelurahan Dago.

Kelurahan Dago merupakan kelurahan yang memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 258 Ha<sup>2</sup> atau sekitar 34,7 % dari luas wilayah Kecamatan Coblong dan Kelurahan yang memiliki wilayah dengan luas terkecil adalah kelurahan Cipaganti dengan luas wilayah 34 Ha. Kelurahan Dago bahkan lebih luas dari penjumlahan luas wilayah tiga kelurahan lain di kecamatan Coblong, Luas wilayah masing-masing kelurahan di Kecamatan Coblong dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah**

Kelurahan	Satuan	Luas Wilayah (Ha)
Cipaganti	Ha	34,00
Lebak Siliwangi	Ha	100,00
Lebak Gede	Ha	101,30
Sadang Serang	Ha	133,00
Sekeloa	Ha	117,00
Dago	Ha	258,00
<b>Total Luas Lahan</b>	<b>Ha</b>	<b>743,30</b>

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Coblong Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 63 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 20 orang merupakan pegawai di Kecamatan Coblong, sebanyak 6 orang merupakan pegawai di Kelurahan Sadangserang, sebanyak 7 orang merupakan pegawai di Kelurahan Dago, sebanyak 8 orang merupakan pegawai di Kelurahan Lebak Siliwangi, sebanyak 8 orang merupakan pegawai di Kelurahan Lebak Gede, sebanyak 6

orang merupakan pegawai di Kelurahan Cipaganti, sebanyak 7 orang merupakan pegawai di Kelurahan Sekeloa.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 10 orang yaitu 4 (empat) orang Kepala Seksi Kecamatan dan 6 (enam) Lurah, Eselon IVb sebanyak 26 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 25 orang tersebar di kecamatan dan kelurahan. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Coblong, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Coblong**

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL
1	KRINDA HAMIDIPRADJA, SH, M.Si NIP. 196803171996031005	Camat	Pembina Tk I, IV/b
2	Drs. IVAN PERMANA, MM NIP. 19650819 198609 1 001	Sekretaris	Pembina, IV/a
3	NENENG KURNIA RAHAYU, S.Pd Nip. 19650603 198603 2 014	Kasi Pemerintahan	Penata Tk, I, III/d
4	Drs. WAWAN SETIAWAN NIP. 19690720 199403 1 005	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Penata Tk I, III/d
5	Drs. ISKANDAR M. NASUTION, MM NIP. 19680713 199003 1 006	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Pembina, IV/a
6	Dra. Hj. RINNA POERWANI HANDAJANI Nip. 196809031990102001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penata Tk I, III/d
7		Kasi Kesejahteraan Sosial	<b>P E N S I U N</b>
8	NIA SURTIKANTI, S.Sos, MP Nip. 19650817 198703 2 010	Sub. Bag. Program dan Keuangan	Pembina, IV/a
9	METI AISAH, S.Kom Nip. 198609192011012002	Sub Bag Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi	Penata, III/c
10	ARIEF BUDI SANTOSO Nip. 197702212014111001	Pengelola Keuangan	Penata Muda Tk.I, III/b
11	EUIS YULIASARI Nip. 19651017 199601 2 001	Pengadministrasi Pelayanan Khusus	Penata Muda Tk I, III/b
12	DINDIN MULYAWAN Nip. 197009161995031001	Verifikator	Penata MudaTK I , III/b
13	GILANG INSAN PRIBADI, AMD Nip. 19800226 200901 1 001	Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor	Penata Muda, III/a

**RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023**  
**KECAMATAN COBLONG**

14	AGUS PURNAMA, S.A.P Nip. 19660830 200701 1 010	Bendahara	Penata Muda, III/a
15	YUNITA FIRIANI, S.AB Nip. 199306022020122008	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Penata Muda, III/a
16	MUAMAR KATON DIPOYUDO, S.Sos. Nip. 199509242020121010	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Penata Muda, III/a
17	ATIN SUKAENAH Nip. 197203232007012003	Pengelola Administrasi Seksi Pemerintahan Kecamatan Coblong	Pengatur Tk I, II/d
18	SARLI SITUMORANG, AMd Nip. 19820512 201503 2 002	Penyusun Data dan Informasi	Pengatur Tk I, II/d
19	YUDI SUPRIYADI Nip. 198303032009011009	Pengadministrasi Persuratan	Pengatur Tk I, II/d
20	TEDI PURNAMA Nip. 19640325 200701 1 011	Pengadministrasi Keuangan	Pengatur Tk I, II/d
21	UJANG SUPRIATNA Nip. 19740712 200801 1 001	Petugas Penindakan	Pengatur Muda Tk I, II/b
22	YAYAN HENDRAYANA Nip. 19720826 201410 1 002	Penyusun Data dan Informasi	Pengatur Muda , II/a

<b>KELURAHAN DAGO</b>			
23	Dra. NURLIAWATI AFFANDI Nip. 19670102 199203 2 007	Lurah Dago	Pembina, IV/a
24	JAJANG DIREJA S.Pd, M.Si Nip. 19650207 198802 1 002	Sekretaris	Penata Tk I, III/d
25	RACHMAT SUPARDAN Nip. 196605231994031004	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Penata Muda Tk I, III/b
26	TATANG MULYANA, SE Nip. 196610092007011006	Kasi Pemerintahan	Penata Muda Tk I, III/b
27	SITI DEWI ROMLAH, SE Nip. 19670724 199203 2 008	Kasi Kesejahteraan Sosial	Penata Tk I, III/d
28	BAMBANG ERAWAN Nip. 197202192008011005	Pengadministrasi Umum	Pengatur Muda Tk I, II/b
29	MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Nip. 198903162019031003	Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan	Penata Muda, III/a
<b>KELURAHAN CIPAGANTI</b>			
30	AGUS SUSILO, SH Nip. 196703261999021001	Lurah Cipaganti	Pembina, IV/a
31	ARIE AGUSTIAN, S.Si Nip. 197208192006041011	Sekretaris	Penata, III/c

**RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023**  
**KECAMATAN COBLONG**

32	DADANG ROHMAN, SE Nip.197406192009011001	Kasi Pemerintahan	Penata Muda, III/a
33	NINING SUMARTINI, SE Nip. 19650505 199003 2 004	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Penata Tk I, III/d
34	ASEP HARIS, S.Sos Nip. 19690211 200604 1 003	Kasi Kesejahteraan Sosial	Penata Tk I, III/d
35	INDRA SUKMA YUDISTIRA, S.IP 198712082019031004	Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan	Penata Muda, III/a
<b>KELURAHAN SADANG SERANG</b>			
36	HASAN ARIFIN, SE, MM Nip. 19790121 201001 1 005	Lurah	Penata, III/c
37	RIANA RAHARJA, S.IP Nip. 19720404 200701 1 011	Sekretaris	Penata Tk I, III/d
38	SUHENDAR, S.AP Nip. 196604201993031011	Kasi Kesejahteraan Sosial	Penata, III/c
39	YANTO SUTANTIO SYACHRIAR,SE Nip. 197001072007011011	Kasi Pemerintahan	Penata Muda Tk I, III/b
40	NENG ASMARANI SYACHBANA,SE, M.M Nip. 198102202009012004	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Penata Muda Tingkat I, III/b
41	ARIS MUNANDAR, S.IP Nip. 198612162019031006	Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan	Penata Muda, III/a
<b>KELURAHAN LEBAK GEDE</b>			
42	CECEP ROHMAT SOLEH, S.S Nip. 196906281998031004	Lurah Lebak Gede	Penata Tk I, III/d
43	CAHYO KARTIKO, SE Nip. 197912312014111002	Sekretaris	Penata Muda, III/a
44	NEVA, S.Pd Nip. 196310191984102008	Kasi Kesejahteraan Sosial	Penata Tk I, III/d
45	HARYONO,S.IP Nip. 196705171991031010	Kasi Pemerintahan	Penata Muda Tingkat I, III/b
46	MUMU NAJMUDIN,S.IP Nip. 197504012007011007	Kasi Ekbang & LH pada Seksi Ekbang	Penata Muda Tingkat I, III/b
47	KOSWARA Nip. 19650112 199703 1 005	Pengadministrasi Keuangan	Pengatur Muda, II/a
48	TIFANI ADILLA SUWANDONO, S.AB Nip. 198512052019032006	Pengelola Ekbang & LH pada Seksi Ekbang	Penata Muda, III/a
49	MAYA NOVITA SARI, S.IP Nip. 199607112019032007	Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan	Penata Muda, III/a
<b>KELURAHAN SEKELOA</b>			
50	TIRTA GUMELAR, S.STP Nip. 19891030 201010 1 003	Lurah Sekeloa	Penata, III/c
51	USMAN ADIREJA,S.Sos Nip. 19721209 1999011001	Sekretaris Kelurahan	Penata, III/c

52	PUPUNG HADIJAH, SE Nip. 197204091997032004	Kasi Pemerintahan	Penata, III/c
53	DEDI, SAB Nip. 197206082005011009	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Penata, III/c
54	LIA GANTINI, A.Md Nip. 197102282006042021	Kasi Kesejahteraan Sosial	Penata, III/c
55	IMAN SUPRIJADI Nip. 196704152007011017	Pranata Perlindungan Masyarakat	Pengatur Tk I, II/d
56	TATI SUKAESIH Nip. 196906012007012010	Pengadministrasi Keuangan	Pengatur Tk I, II/d
<b>KELURAHAN LEBAK SILIWANGI</b>			
57	NUR SHOMADDIN, S.STP, M.Si Nip. 19830503 200112 1 001	Lurah Lbk Siliwangi	Pembina, IV/a
58	BUDI RUKMANA, S.Sos Nip. 196906171994031006	Sekretaris	Penata Tk I, III/d
59	SRI RAHAYU, SIP Nip. 19780411 199703 2 001	Kasi Kesejahteraan Sosial	Pembina, IV/a
60	Dra. IIS SUNDARI, M.AP Nip. 196609181992022001	Kasi Pemerintahan	Pembina, IV/a
61	TINA ZULAIHA, S.IP Nip. 197305152006042004	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Penata Tk I, III/d
62	MELDA YULIANTI, S.IP Nip. 199505282019032015	Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan	Penata Muda, III/a
63	ELIT SOLEHA, S.Kesos Nip. 199508302019032013	Pengelola Kesos pada Seksi Kesos	Penata Muda, III/a
64	ARBY BIMANTARA, S.AB Nip. 199211152019031013	Pengelola Ekbang & LH pada Seksi Ekbang	Penata Muda, III/a

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III/a	Eselon III/b	Eselon IV/a	Eselon IV/b	Staff	Jumlah
1	Kecamatan	-	-	1	1	3	2	13	20
2	Kelurahan Dago	-	-	-	-	1	4	2	7
3	Kelurahan Sekeloa	-	-	-	-	1	4	2	7

4	Kelurahan Lebak Gede	-	-	-	-	1	4	3	8
5	Kelurahan Lebak Siliwangi	-	-	-	-	1	4	3	8
6	Kelurahan Cipaganti	-	-	-	-	1	4	1	6
7	Kelurahan Sadang Serang	-	-	-	-	1	4	1	6
<b>JUMLAH</b>		-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>63</b>

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Coblong Kota Bandung, sebanyak 9 orang (14,3%) memiliki pendidikan S2, sebanyak 65 orang (65,07%) yang memiliki pendidikan S1, sebanyak 1 orang (1,6%) memiliki pendidikan D3, sebanyak 11 orang (70,5%) yang memiliki pendidikan SLTA, sebanyak 1 orang (1,6%) yang memiliki pendidikan SLTP.

### 2.3 Anggaran

Dari sisi anggaran, Kecamatan Coblong Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2018-2023 beserta serapannya sebagai berikut

**Tabel 2.5**  
**Anggaran Tahun 2018-2023**

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	33.692.515.503	30.383.243.819	90,18%
2	2019	23,207,298,707	22,409,074,359	96,56%
3	2020	15.846.901.583	15.060.810.862	95,04%

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Kecamatan Coblong pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 telah terjadi Pandemi Covid-19 di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pandemi covid-19 ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2020, bahwa angka

LPE Kota Bandung menurun sebesar -2,28. Menurunnya angka LPE Kota Bandung ini secara signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Bandung dan perubahan isu prioritas Kota Bandung. Dengan anggaran yang terbatas, maka anggaran Kota Bandung diprioritaskan kepada program pemulihan ekonomi dampak dari pandemic Covid-19. Kecamatan Coblong sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Bandung telah melakukan rasionalisasi kurang lebih sebesar 35%.

Namun demikian, meskipun anggaran Kecamatan Coblong mengalami penurunan, secara kinerja, capaiannya sebagian besar memenuhi target bahkan terdapat beberapa sasaran yang melampaui target kinerja. Target kinerja yang tidak tercapai lebih disebabkan kepada koordinasi internal Kecamatan Coblong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang optimal.

#### 2.4 Aset, Sarana dan Prasarana

Kecamatan Coblong Kota Bandung secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Kecamatan Coblong Kota Bandung Sampai Dengan Tahun 2020**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	4	7	8
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	Baik
2	Electric Generating Set Lain-lain	1	Baik
3	Portable Water Pump	3	Baik
4	Pompa Lain-lain	2	Baik
7	Pick Up	6	Baik
8	Mobil Ambulance	2	Baik
9	Sepeda Motor	40	Baik
10	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	73	Baik
11	Gerobak Tarik	1	Baik
12	Gerobak Dorong	26	Baik
13	Sepeda	3	Baik

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

14	Mesin Gergaji	7	Baik
15	Scanner	2	Baik
16	Air Conditioning Unit	9	Baik
17	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
18	Lemari Penyimpanan	3	Baik
19	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1	Baik
20	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
21	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	16	Baik
22	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Baik
23	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
24	Mesin Calculator	1	Baik
25	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2	Baik
26	Alat Penggandaan Lain-lain	2	Baik
27	Lemari Besi	38	Baik
28	Rak Besi/Metal	1	Baik
29	Filling Besi/Metal	31	Baik
30	Lemari Sorok	29	Baik
31	Lemari Makan	1	Baik
32	Papan Visuil	4	Baik
33	Alat Penghancur Kertas	5	Baik
34	Papan Pengumuman	7	Baik
35	Papan Tulis	1	Baik
36	White Board	1	Baik
37	Alat Penghancur Kertas Globe	2	Baik
38	Mesin Absensi	7	Baik
39	Overhead Projektor	5	Baik
40	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	43	Baik
41	Lemari Kayu	2	Baik
42	Rak Kayu	1	Baik
43	Meja Kayu/Rotan	14	Baik
44	Kursi Besi/Metal	90	Baik
45	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	14	Baik
46	Zice	2	Baik
47	Meja Rapat	13	Baik
48	Meja Tulis	23	Baik
49	Meja Reseption	6	Baik
50	Meja Tambahan	2	Baik

51	Meja Panjang	1	Baik
52	Kursi Rapat	247	Baik
53	Kursi Tamu	8	Baik
54	Kursi Tangan	60	Baik
55	Kursi Putar	10	Baik
56	Kursi Biasa	7	Baik
57	Bangku Tunggu	16	Baik
58	Meja Komputer	4	Baik
59	Tenda	15	Baik
60	Meja Biro	29	Baik
61	Sofa	16	Baik
62	Lemari Pakaian	4	Baik
63	MEBELER LAINNYA	8	Baik
64	Mesin Potong Rumput	8	Baik
65	Alat Pembersih Lain-lain	3	Baik
66	Lemari Es	2	Baik
67	AC Unit	3	Baik
68	Exhause Fan	2	Baik
69	Alat Pendingin Lain-lain	5	Baik
70	Kompore Gas	1	Baik
71	Kitchen Set	1	Baik
72	Tabung Gas	2	Baik
73	Televisi	21	Baik
74	Loudspeaker	1	Baik
75	Sound System	10	Baik
76	Microphone Floor Stand	2	Baik
77	Mic Conference	4	Baik
78	Camera Video	1	Baik
79	Camera Film	6	Baik
80	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik
81	Tangga Alumunium	7	Baik
82	Dispenser	4	Baik
83	Mimbar/Podium	1	Baik
84	Handy Cam	8	Baik
85	Alat Pemadam Portable	27	Baik
86	P.C Unit/ Komputer PC	28	Baik
87	Lap Top	37	Baik
88	Note Book	33	Baik
89	Personal Komputer Lain-lain	34	Baik
90	Hard Disk	2	Baik
91	Printer	64	Baik

92	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	5	Baik
93	Server	1	Baik
94	Modem	2	Baik
95	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Baik
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Baik
97	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Baik
98	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	3	Baik
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik
100	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	11	Baik
101	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	10	Baik
102	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	4	Baik
103	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	Baik
104	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	8	Baik
105	Camera + Attachment	2	Baik
106	Proyektor + Attachment	15	Baik
107	Microphone/Wireless Mic	7	Baik
108	Unintemuptible Power Supply (UPS)	5	Baik
109	Enconder/Decoder	1	Baik
110	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Baik
111	Camera Electronic	36	Baik
112	Tripod Camera	1	Baik
113	Loudspeaker	1	Baik
114	Sound System	5	Baik
115	Pesawat Telephone	1	Baik
116	Telephone Mobile	42	Baik
117	Handy Talky	8	Baik
118	Facsimile	1	Baik
119	Timbangan Bayi	36	Baik
120	Mixer	1	Baik
121	Stabilizer	3	Baik
122	Generator	1	Baik
123	Personal Komputer	42	Baik
124	Meja Kerja	11	Baik
125	Tali/Benang	1	Baik
126	Layar	1	Baik
127	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2	Baik
128	Serial Scanner/Printe	2	Baik
129	Camera Scope	1	Baik

130	Software Cont Off-line Computer	5	Baik
131	Dispencer	2	Baik
132	CCTV	6	Baik
133	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	Baik
134	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Baik
135	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	2	Baik
136	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	Baik
137	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
138	Bangunan Pembuangan Air Hujan	51	Baik
139	Alat Volley	3	Baik
140	Alat Tenis Meja	1	Baik
141	Alat Sepak Bola	3	Baik
142	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	34	Baik

Sumber : Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Coblong Kota Bandung (Juni 2020)

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dan lainnya) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi aset (barang dan kendaraan) serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Kecamatan Coblong

## 2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat

dan Lurah, dengan begitu Kecamatan Coblong dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha.
2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan
3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman di wilayah Kecamatan Coblong dan sebagainya.
4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR di wilayah Kecamatan Coblong dan sebagainya.
5. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Coblong Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2013-2018 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Capaian kinerja Kecamatan Coblong**  
**Tahun 2013 - 2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat				65	80	82	84	84	77.05	81.52	82	84.05	84.09	118.54	101.90	100	100,06	100.10
2	Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti				100	100	100			100	100	100			100	100	100		
3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan Publik versi ombuds				800	920	995			910	995	995			113.75	108.15	100		
4	Persentas pelayanan Administrasi kependudukan tepat waktu				65	79.54	93.61			79,54	93.61	93.61			122,37	117.69	100		
5	Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu				65,00	81.83	93.19			81.83	93.19	97.91			125,89	113.88	105.06		
6	Persentase Kelurahan yan standar kriteria baik				50	66,67	66,67			50,00	66.67	66.67			100	100	100		
7	Persentase RW Juara				33,33	70,67	80,00			47,11	70.67	81.33			141,34	100	115.08		
8	Persentas Lembaga kemasyarakatan Aktif				28,57	66,67	90.47			42,86	90.47	90.47			150,02	135.7	100		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

9	Rasio Anggota Linmas				1:0,5	1:1	1:1			1:0,7	1:1	1:1			140,00	100	100		
10	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat							75	75				76,33	77,80				101,77	108.65
11	Nilai AKIP Kecamatan				50	69	72.70			68.69	72.70	72.70			137.38	105.36	100		
12	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100	100			100	100	100			100	100	100		

**Tabel 2.8**  
**Capaian Anggaran Kecamatan Coblong**  
**Tahun 2013 - 2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	4.867.071.600	1.772.900.000	5.897.575.000	129.273.200	4.067.307.390	4.217.138.010	1.763.013.240	5.712.027.595	124.653.450	3.384.703.049	86,65	99,44	97,37	96,00	83,22		
Program Inovasi dan Pemberdayaan Kewilayahan	0	9.300.000.000	9.300.000	10.486.831.764	8.689.107.057	0	8.972.914.499	9.092.182.910	10.301.202.513	8.542.422.273	0	96,48	93,17	98,00	98,31		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59.400.000	30.000.000	43.700000	-		28.562.500	25.803.000	43.310.600	-		49,09	86,01	99,00				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		424.800.000		196.771.663	88.082.213		303.326.743		132.139.663	54.950.393		71,00		67,15	62,39		
Program Peningkatan		264.000.000		16.406.500	538.271.484		213,567,213		15.840.000	506.063.642		81,00	94,02	96,5	96,55		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		55.000.000		36.437.500	483.216.000		53.922.800		36.437.500	460.889.942		98,00		100	95,38		
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		70.000.000		0	802.727.400		67.506.000		0	802.163.700		96.00		0	99,93		
<b>Jumlah</b>																	

## 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Coblong Kota Bandung

Sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

### - Tantangan

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Coblong;
2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
3. Masih kurangnya kepedulian pihak swasta dalam mendukung program pelaksanaan pembangunan
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan pembangunan di lingkungan masyarakatnya yang berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum
6. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
7. Masih tingginya angka pengangguran
8. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
9. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Coblong masih perlu ditingkatkan lagi
10. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

### - Peluang

1. Penduduk Kecamatan Coblong memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Coblong yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
4. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Coblong cukup signifikan;

5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Coblong harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Coblong Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Pada tahun 2018 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Anggaran Tahun 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja			
- Belanja Tidak Langsung	13.276.787.670,38	12.210.672.506	91,97 %
- Belanja Langsung	20.415.727.832,62	18.172.571.313	89,01 %
<b>Jumlah</b>	<b>33.692.515.503</b>	<b>30.383.243.819</b>	<b>90,18 %</b>

Realisasi keuangan Kecamatan Coblong Kota Bandung pada tahun anggaran 2018 untuk belanja sebesar Rp. 30.383.243.819,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.210.672.506,- (91,97%) dan belanja langsung sebesar Rp. 18.172.571.313,- (89,01%).

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Coblong, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Coblong dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Coblong sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, salah satunya dalam kaitan pelayanan KTP dan KK dengan prosedur tertentu menjadikan waktu pengerjaannya relatif lama;
2. Kebijakan Pemerintah yang menjadikan Kecamatan berfungsi sebagai fasilitator, menjadikan ruang gerak kecamatan menjadi lebih sempit;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Coblong.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Coblong dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Coblong, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan. Berbagai hal dapat menjadi alasan atas belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan. Beberapa alasan tersebut adalah belum adanya anggaran yang dapat mengakomodir segala bentuk partisipasi lembaga kemasyarakatan, selain itu faktor-faktor seperti belum terjalannya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi, misalnya kurangnya sosialisasi kegiatan dan informasi kebijakan yang menjadikan partisipasi lembaga kemasyarakatan belum optimal.

2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, hal ini dapat dilihat dari aspek kurangnya pengetahuan aparatur tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
7. Tingkat koordinasi antarlembaga kemasyarakatan dalam penanganan bencana masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola);

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Coblont, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan, dari data kepegawaian yang ada pada Bab sebelumnya, nampak bahwa adanya kekurangan personil terutama pada tataran staf. Dampaknya adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan administrasi, dan penyusunan laporan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung percepatan kinerja aparatur, seperti kurangnya kendaraan dinas bagi aparat, kurangnya PC/Komputer di masing-masing kelurahan, dll;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Coblont diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Kecamatan Coblont Kota Bandung antara lain :

1. Faktor internal yang sangat mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Coblong adalah sumber daya manusia (SDM). Dari aspek SDM Kecamatan Coblong memiliki jumlah pegawai yang kurang memadai dibandingkan dengan tugas dan beban kerja. Selain itu, masih ada beberapa pegawai yang kurang dari aspek kapasitas (tingkat pendidikan yang kurang, aspek ekonomi dan finansial pegawai, aspek kedisiplinan, dll).
2. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat hal-hal tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian tugas yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, dll;
3. Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tersusun dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Coblong Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  2. Beragamnya karakter masyarakat yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Kecamatan Coblong;
  3. Kondisi wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Coblong, hal ini dapat dilihat dari faktor kemungkinan bencana alam (banjir sungai cikapayang dan sungai cidurian), kebakaran, dll.
  4. Kebijakan pemerintah Kota Bandung tentu saja mempengaruhi kinerja Pelayanan Kecamatan Coblong, misalnya dalam lambatnya menetapkan anggaran menjadikan aktivitas pelayanan di Kecamatan Coblong.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Coblong diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Kecamatan Coblong Kota Bandung antara lain :
5. Faktor internal yang sangat mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Coblong adalah sumber daya manusia (SDM). Dari aspek SDM Kecamatan Coblong memiliki jumlah pegawai yang kurang memadai dibandingkan dengan tugas dan beban kerja. Selain itu, masih ada beberapa pegawai

yang kurang dari aspek kapasitas (tingkat pendidikan yang kurang, aspek ekonomi dan finansial pegawai, aspek kedisiplinan, dll).

6. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat hal-hal tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian tugas yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, dll;
7. Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
8. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tersusun dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Coblong Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Beragamnya karakter masyarakat yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Kecamatan Coblong;
3. Kondisi wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Coblong, hal ini dapat dilihat dari faktor kemungkinan bencana alam (banjir sungai cikapayang dan sungai cidurian), kebakaran, dll.
4. Kebijakan pemerintah Kota Bandung tentu saja mempengaruhi kinerja Pelayanan Kecamatan Coblong, misalnya dalam lambatnya menetapkan anggaran menjadikan aktivitas pelayanan di Kecamatan Coblong.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :

#### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan

dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

## **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Coblong dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

### 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good*

*governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG  
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,*
- Unggul** : *Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*
- Nyaman** : *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,*
- Sejahtera** : *Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi*

dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor

lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

*Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.*

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani

*Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima*

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

*Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal*

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

*Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan*

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

*Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta*

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Coblong tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Coblong adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Coblong.

#### **3.3.2 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

**Gambar 3.1**  
**Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

### 3.3.3 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

#### **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

**Jabar Juara Lahir Batin** : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

**Inovasi** : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

**Kolaborasi** : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

### **“Reliigus – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”**

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID-

19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19; dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:
  1. Akses pendidikan untuk semua
  2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
  3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
  4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
  5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
  6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
  7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
  8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)

#### **3.3.4 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023**

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung menguraikan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjawab isu strategis Kota Bandung yaitu :

1. pendidikan
2. Peningkatan derajat masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan
4. Ketimpangan ekonomi
5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis di atas maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu : **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”** dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

### 3.4 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Coblong Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Coblong Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- i. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- ii. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- iii. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- iv. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
- v. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Coblong Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 9 Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Isu Lingkungan Hidup
2. Pencemaran lingkungan
3. Banjir cileuncang
4. Penimbunan sampah
5. Penyediaan RTH
  - a. Isu Infrastruktur
6. Kemacetan lalu lintas
7. Ketersediaan transportasi umum

8. Buruknya drainase lingkungan
9. Kualitas jalan
  - a. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin
  - c. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
  - d. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
  - e. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
  - f. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
  - g. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

---

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Coblong dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

### **1. Reformasi Birokrasi (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

### **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat“. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Coblong dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

### **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem

peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi

#### **4. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan

aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan**

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai visi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Coblong menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasannya hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Coblong Sebelum Perubahan**  
**Tahun 2018 - 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Sebelum Perubahan				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong	Nilai	80,00	84.92	84.95	84.97	87
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Coblong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong	Nilai	80,00	84.92	84.95	84.97	87
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	58,89	66,67	69,57	70,97	72,37
2	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	78,99	90,01	91,97	93,71	95,46
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	78,99	90,01	91,97	93,71	95,46

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.
6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari

penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut

8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, Renstra Kecamatan Coblong juga mengalami perubahan. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di misi 1 dan 2. Pada misi 1, tujuan Kecamatan adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dan sasarannya adalah:
  - a. meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan
  - b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Coblong
2. Pada misi 2, tujuan kecamatan adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Coblong
  - b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Coblong
3. Penambahan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Perubahan target persentase pemberdayaan masyarakat, dikarenakan ada perubahan cara perhitungan.

Perubahan tujuan dan sasaran serta indikator dan target Perubahan  
Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2018-2023

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Kecamatan Coblong**  
**Tahun 2018 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja Setelah Perubahan			Kondisi Akhir Periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing</b>											
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	78.99	89.40	92.58	91,97	93,71	95,46	95.46
		meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Coblong	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	78.99	89.40	92.58	91,97	93,71	95,46	95.46
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Coblong	Persentase Siskamling RW aktif	%	n/a	n/a	n/a	65	65	65	65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja Setelah Perubahan			Kondisi Akhir Periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih</b>											
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong	Nilai	80	80.14	87.89	84.95	84.97	87	87
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Coblong	Persentase Kelurahan Unggul	%	n/a	85.25	66.67	69,57	70,97	72,37	72.37
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Coblong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong	Nilai	80	80.14	87.89	84.95	84.97	87	87

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi Organisasi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayanan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

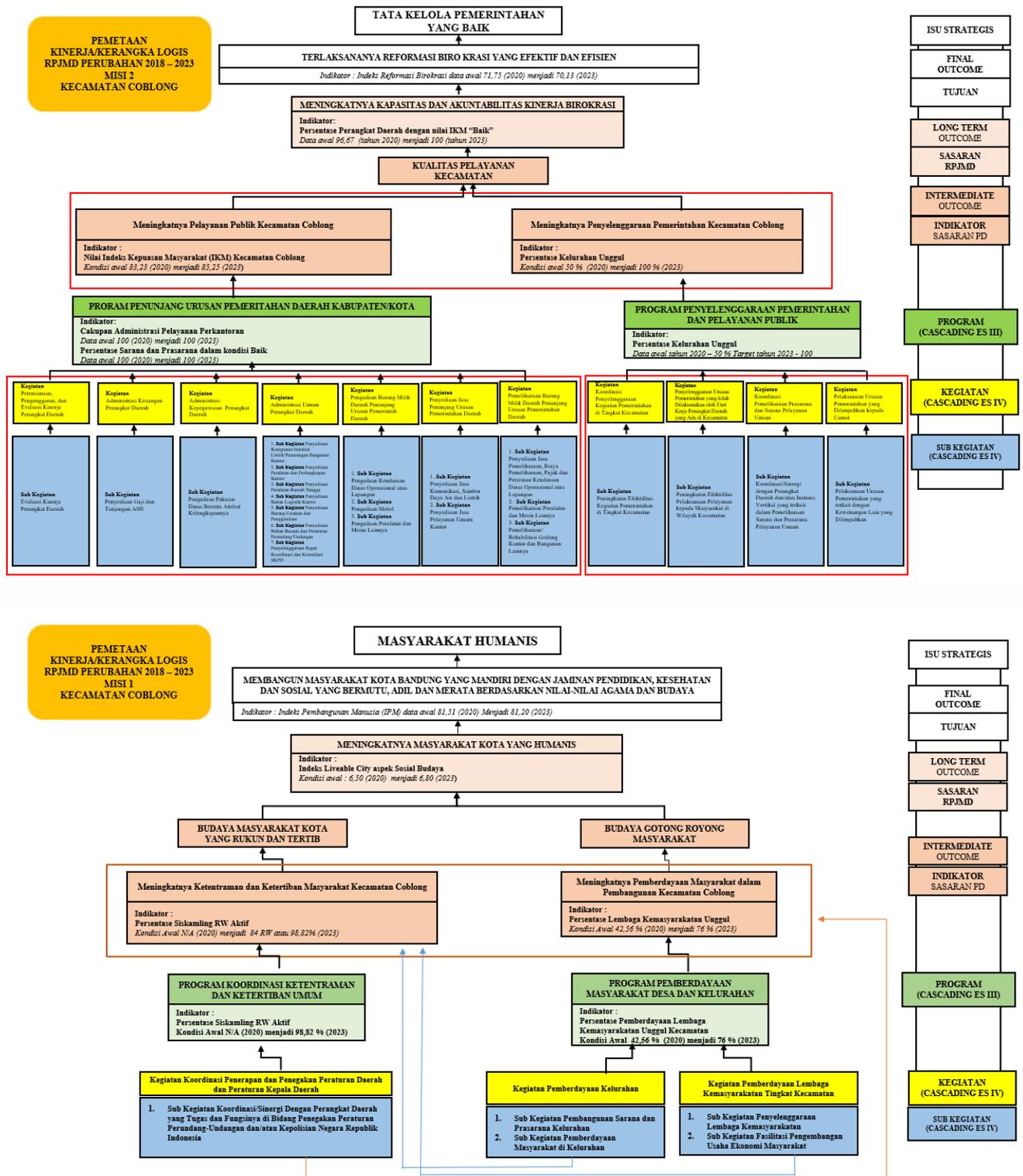
Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

*Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. *Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana

aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1  
Logic Model



## 5.2 Kebijakan Organisasi

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Coblong adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Coblong
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Coblong dapat dilihat di tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Sebelum Perubahan**

<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>		
<b>Misi 1</b>	<b>Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing</b>		
<b>Misi 2</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan,	Meningkatkan Peran Serta Lembaga	Meningkatkan Pemberdayaan

	masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	masyarakat dalam Pembangunan	Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Setelah Perubahan**

<b>Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>			
<b>Misi 1 Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Coblong	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Coblong	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
<b>Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Coblong	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Coblong	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari

kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Coblong pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Coblong periode tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Coblong**  
**Tahun 2014- 2018**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.15.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	2,473,644,734	100%	2,721,009,207	100%	2,993,110,128	100%	3,292,421,141	100%	3,621,663,255	100%	15,101,848,466	Kec Coblong	Kec + Kel		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		4.15..01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	307,450,135	12 Lap	338,195,149	12 Lap	372,014,663	12 Lap	409,216,130	12 Lap	450,137,743	12 Lap	1,877,013,819	Kec Coblong	Kec + Kel	

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.0 1.0 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Keg	1 Keg	55,000,000	1 Keg	60,500,000	1 Keg	66,550,000	1 Keg	73,205,000	1 Keg	80,525,500	1 Keg	335,780,500	Kec Coblong	Kecamatan

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		4.1 5.0 1.0 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	123 Unit	123 Unit	32,341,600	123 Unit	35,575,760	123 Unit	39,133,336	123 Unit	43,046,670	123 Unit	47,351,337	123 Unit	197,448,702	Kec Coblong	Kecamatan	

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.0 1.0 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulan an	12 Jasa Bulan an	421,233,600	12 Jasa Bulanan	463,356,960	12 Jasa Bulanan	509,692,656	12 Jasa Bulanan	560,661,922	12 Jasa Bulanan	616,728,114	12 Jasa Bulanan	2,571,673,251	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.0 1.0 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	53 Unit	53 Unit	34,410,000	53 Unit	37,851,000	53 Unit	41,636,100	53 Unit	45,799,710	53 Unit	50,379,681	53 Unit	210,076,491	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.0 1.0 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	105,653,507	12 Lap	116,218,858	12 Lap	127,840,743	12 Lap	140,624,818	12 Lap	154,687,300	12 Lap	645,025,226	Kec Coblong	Kec + Kel
		4.1 5.0 1.0 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan yang terrealisasi	Jumlah jenis cetakan dan pengadaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	59,457,430	12 Lap	65,403,173	12 Lap	71,943,490	12 Lap	79,137,839	12 Lap	87,051,623	12 Lap	362,993,556	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		4.1 5.0 1.0 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerimaan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerimaan Bangunan Kantor yang terrealisasi	4 Laporan	4 Laporan	19,262,138	4 Laporan	21,188,352	4 Laporan	23,307,187	4 Laporan	25,637,906	4 Laporan	28,201,696	4 Laporan	117,597,279	Kec Coblong	Kec + Kel	

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.1 5.0 1.0 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	7 Laporan	7 Laporan	663,918,755	7 Laporan	730,310,631	7 Laporan	803,341,694	7 Laporan	883,675,863	7 Laporan	972,043,449	7 Laporan	4,053,290,391	Kec Coblong	Kec + Kel		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.0 1.0 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	4 Laporan	4 Laporan	39,265,470	4 Laporan	43,192,017	4 Laporan	47,511,219	4 Laporan	52,262,341	4 Laporan	57,488,575	4 Laporan	239,719,621	Kec Coblong	Kec + Kel
		4.1 5.0 1.0 15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-	4 Laporan	4 Laporan	28,530,000	4 Laporan	31,383,000	4 Laporan	34,521,300	4 Laporan	37,973,430	4 Laporan	41,770,773	4 Laporan	174,178,503	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			undangan.	ang-undangan															
		4.1 5.0 1.0 17	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Laporan	12 Laporan	65,879,050	12 Laporan	72,466,955	12 Laporan	79,713,651	12 Laporan	87,685,016	12 Laporan	96,453,517	12 Laporan	402,198,188	Kec Cobl ong	Kec + Kel
		4.1 5.0 1.0 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan	7 Laporan	7 Laporan	161,243,049	7 Laporan	177,367,354	7 Laporan	195,104,089	7 Laporan	214,614,498	7 Laporan	236,075,948	7 Laporan	984,404,938	Kec Cobl ong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			<i>luar daerah</i>	<i>konsultasi keluar daerah</i>																	

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.0 1.0 19	Penyediaan jasa tenaga kerja penduduk administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan penduduk administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	480,000,000	12 Laporan	528,000,000	12 Laporan	580,800,000	12 Laporan	638,880,000	12 Laporan	702,768,000	12 Laporan	2,930,448,000	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparat ur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	100%	2,388,458,542	100%	2,627,304,396	100%	2,890,034,836	100%	3,179,038,319	100%	3,496,942,151	100%	16,939,912,921	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 5.0 2.0 5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	2 unit	69,829,000	2 Unit	33,000,000	2 Unit	33,000,000	2 Unit	33,000,000	8 Unit	168,829,000	Kec Coblong	Kec + Kel
		4.0 5.0 2.1 0	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	0	0	0	4 jenis	65,303,597	1 Jenis	88,000,000	1 Jenis	88,000,000	1 Jenis	88,000,000	5 Jenis	329,303,597	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.0 2.0 13	Dekoras i Pemban gunan Gedung	Jumlah unit gedung yang didekor asi	1 Unit	1 Unit	230,750,000	1 Unit	300,000,000	3 Unit	250,000,000	0	0	0	0	4 Unit	780,750,000	Kec Coblong	Kec + Kel
		4.1 5.0 2.0 22	Pemelih araan rutin/ berkala gedung kantor.	Jumlah unit bangun an terpelih ara	2 Unit	2 Unit	164,921,299	7 Unit	750,000,000	7 Unit	3,164,921,299	Kec Coblong	Kec + Kel						

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.0 2.0 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	59 Unit	59 Unit	686,239,600	59 Unit	754,863,560	59 Unit	830,349,916	59 Unit	913,384,908	59 Unit	1,004,723,398	59 Unit	4,189,561,382	Kec Coblong	Kec + Kel
		4.1 5.0 2.0 42	Pembangunan Gedung Kantor.	Jumlah gedung yang direhab	6 Unit	6 Unit	1,306,547,643	1 Unit	7,000,000,000	0	0	0	0	0	0	6 Unit	8,306,547,643	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	0	100%	143,710,676	100%	158,081,744	100%	173,889,918	100%	191,278,910	100%	666,961,247	Kec Coblong	Kec + Kel		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.0 3.0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	52 stell	38,578,176	52 stell	42,435,994	52 stell	46,679,593	52 stell	51,347,552	52 stell	179,041,315	Kec Coblong	Kecamatan
		4.1 5.0 3.0 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0	0	156 stell	105,132,500	156 stell	115,645,750	156 stell	127,210,325	156 stell	139,931,358	156 stell	487,919,933	Kec Coblong	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemanfaatan ASN yang mendapat pembinaan	100%	100%	77,000,000	100%	84,700,000	100%	93,170,000	100%	102,487,000	100%	112,735,700	100%	470,092,700	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.0 5.0 2	Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 Paket	1 Paket	77,000,000.00	1 Paket	84,700,000	1 Paket	93,170,000	1 Paket	102,487,000	1 Paket	112,735,700	1 Paket	470,092,700	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong	70	70	13,749,341,980	71	15,124,276,178	72	16,636,703,796	73	18,300,374,175.38	74	20,130,411,592.92	74	65,849,621,855.10		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			Persentase Kelurahan Unggul	N/A	N/A	7,855,737,480	16,67%	8,641,311,228	33,33%	9,505,442,351	50%	10,455,986,586	66,67%	11,501,585,244	66,67%	38,914,319,956				

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		4.1 5.1 5	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	75%	75%	1,962,132,980	75%	2,158,346,278	75%	2,374,180,906	75%	2,611,598,996	75%	2,872,758,896	75%	11,979,018,056	Kec Coblong	Kec + Kel	

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.1 5.1 5.0 05	Kegiatan Penedalihan Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	64 RW	64 RW	1,962,132,980	65 RW	2,158,346,278	65 RW	2,374,180,906	65 RW	2,611,598,996	65 RW	2,872,758,896	65 RW	11,979,018,056	Kec Coblong	Kec + Kel		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.1 5.2 5.0 05	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	,	435 kader	629,351,042	435 kader	692,286,146	435 kader	761,514,761	435 kader	837,666,237	435 kader	921,432,861	435 kader	3,842,251,047	Kec Coblong	Kec + Kel		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.1 5.3 3.0 01	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	-	107 kader/ kel	320,510,000	107 kader/ kel	352,561,000	107 kader/ kel	387,817,100	107 kader/ kel	426,598,810	107 kader/ kel	469,258,691	107 kader/ kel	469,258,691	Kec Coblong	Kec + Kel		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.1 5.2 5.0 1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM M kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	-	86 Usaha / Klp / Org	95,456,200	86 Usaha / Klp / Org	105,001,820	86 Usaha / Klp / Org	115,502,002	90 Usaha / Klp / Org	127,052,202	95 Usaha / Klp / Org	139,757,422	95 Usaha / Klp / Org	582,769,647	Kec Coblong	Kec + Kel		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.1 9.0 53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	-	180 orang	46,493,067.00	190 orang	51,142,374	195 orang	56,256,611	200 orang	61,882,272	210 orang	68,070,499	215 orang	283,844,823	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Coblong			Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se Kecamatan Coblong	75	75	5,893,604,500	75,4	6,482,964,950	75,6	7,131,261,445	75,8	7,844,387,590	76	8,628,826,348	76	26,935,301,899	Kec Coblong	Kec + Kel		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.1 5.2 0	Program Pengad ministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	75%	2,696,485,000	75,2%	2,966,133,500	75,5%	3,262,746,850	75,8%	3,589,021,535	76,2%	3,947,923,689	76%	7,416,567,640	Kec Coblong	Kec + Kel		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.2 0.0 1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nomina tif Pelayan an Lengka p	,	28 Laporan	67,785,000	28 Laporan	74,563,500	28 Laporan	82,019,850	28 Laporan	90,221,835	28 Laporan	99,244,019	28 Laporan	413,834,204	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.2 0.0 2	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW menda patkan pembinaan	-	100 %	2,628,700,000	100 %	942,476,500	100 %	1,036,724,150	100 %	1,140,396,565	100 %	1,254,436,222	100 %	7,002,733,437	Kec Coblong	Kec + Kel
		4.1 5.4 2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	-		3,197,119,500		3,516,831,450		3,868,514,595		4,255,366,055		4,680,902,660		19,518,734,259	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.4 2.0 15	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	.	370 m <sup>2</sup>	157,516,931	370 m <sup>2</sup>	173,268,624	370 m <sup>2</sup>	190,595,487	370 m <sup>2</sup>	209,655,035	370 m <sup>2</sup>	230,620,539	370 m <sup>2</sup>	961,656,615	Kec Coblong	Kec + Kel
		4.1 5.4 2.0 14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	.	4500 m <sup>2</sup>	2,891,818,073	4500 m <sup>2</sup>	3,180,999,880	4500 m <sup>2</sup>	3,499,099,868	4500 m <sup>2</sup>	3,849,009,855	4500 m <sup>2</sup>	4,233,910,841	4500 m <sup>2</sup>	17,654,838,517	Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.4 2.0 16	Kegiatan pemecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	.	3.722 m2	147,784,496	3.722 m2	162,562,946	3.722 m2	178,819,240	3.722 m2	196,701,164	3.722 m2	216,371,281	3.722 m2	902,239,127	Kec Coblong	Kec + Kel

	<b>Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan wilayah</b>	75%	75%	10,957,459,207	75,4%	11,370,000,000	75,6%	12,420,000,000	75,8%	13,488,000,000	76%	13,110,000,000	76%	61,203,509,940	Kec Coblong
	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan kewilayahan</b>	75%	75%	10,957,459,207	75,4%	11,370,000,000	75,6%	12,420,000,000	75,8%	13,488,000,000	76%	13,110,000,000	76%	61,203,509,940	Kec Coblong

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.1 5.2 6	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	75%	75%	10,815,509,940	75,4%	11,370,000,000	75,6%	12,420,000,000	75,8%	13,488,000,000	76%	13,110,000,000	76%	61,203,509,940	Kec Coblong	Kec + Kel		

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.2 6.0 1	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pembe rdayaan Lingkup RW	418 sub keg	418 sub keg	9,024,808,475	424 sub keg	9,570,000,000	418 sub keg	10,440,000,000	418 sub keg	11,310,000,000	418 sub keg	11,310,000,000	418 sub keg	51,654,808,475	Kec Coblong	Kelurahan
		4.1 5.2 6.0 2	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pembe rdayaan Lingkup PKK	61 sub Keg	61 sub Keg	599,505,557	61 sub Keg	600,000,000	58 sub Keg	660,000,000	58 sub Keg	726,000,000	58 sub Keg	600,000,000	58 sub Keg	3,185,505,557	Kec Coblong	Kelurahan

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.1 5.2 6.0 3	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pembe rdayaan n Lingkup Karang Taruna	38 sub keg	38 sub keg	590,870,907	38 sub keg	600,000,000	36 sub keg	660,000,000	36 sub keg	726,000,000	36 sub keg	600,000,000	36 sub keg	3,176,870,907	Kec Coblong	Kelurahan
		4.1 5.2 6.0 4	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pembe rdayaan n Lingkup LPM	42 sub keg	42 sub keg	600,325,001	40 sub keg	600,000,000	30 sub keg	660,000,000	30 sub keg	726,000,000	30 sub keg	600,000,000	30 sub keg	3,186,325,001	Kec Coblong	Kelurahan

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		4.1 5.1 9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	-	100%	46,493,067												Kec Coblong	Kec + Kel

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
		4.1 5.1 9.0 53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	-	180 orang	46,493,067.00																

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		4.1 5.2 5	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	-	86,15 %	95,456,200												Kec Coblong	Kec + Kel
		4.1 5.2 5.0 1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	-	86 Usaha / Klp / Org	95,456,200													

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Coblong Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Coblong Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Coblong untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Coblong Kota Bandung yaitu :

**Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul
2. Persentase siskamling RW Aktif
3. Persentase Kelurahan Unggul
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah Perubahan Kecamatan Coblong Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cobleng**  
**Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI /CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan COBLONG	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan COBLONG	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspektorat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kecamatan	<b>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini :</b> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

							<p>kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat</li> </ul> <p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Kepengurusan</li> <li>- Gardu Sosial</li> <li>- Lumbung sosial</li> <li>- Peta Rawan Bencana</li> <li>- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana</li> </ul> <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- petunjuk arah ke masjid</li> <li>- ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/ alarm waktu sholat</li> </ul> <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	---

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	---

**RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023**  
**KECAMATAN COBLONG**

							<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</li> <li>3. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</li> <li>4. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas</li> <li>5. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</li> <li>6. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</li> </ol> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p><b>Kriteria Siskamling Aktif :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	---

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

							maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% RW Unggul + % PKK Unggul + % Karang Taruna Unggul + % LPM Unggul	Kelurahan	<p><b>RW Unggul</b> <b>(Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</b></p> <p><b>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga</li> <li>2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</li> <li>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</li> <li>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</li> <li>5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna</li> <li>6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola</li> </ol>

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

						<p>sampah dengan metode lainnya</p> <p><b>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir)</li> <li>4. Laporan RW tepat waktu minimal form A :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)</li> <li>b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</li> <li>c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</li> </ol> </li> <li>5. Koperasi di Sarana ibadah             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Anggota</li> <li>b. Memiliki Kepengurusan</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--	--	--	--	---

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

							<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Memiliki AD/ART</li> <li>6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah</li> <li>b. Kegiatan pengajian</li> <li>c. Mengaktifkan remaja masjid</li> <li>d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi</li> </ul> </li> <li>7. RW berdaya               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada kepengurusan</li> <li>b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)</li> <li>c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)</li> </ul> </li> <li>8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)</li> <li>9. 1 rumah 1 Kader Jumanti;</li> <li>10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>11. Taman Tematik ramah disabilitas</li> <li>12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang;</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	---

**RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023**  
**KECAMATAN COBLONG**

						<p>13. 50 Penanaman Pohon</p> <p>14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan;</p> <p>15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan;</p> <p>16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air;</p> <p>17. Kelompok Lansia Sehat;</p> <p>18. Posyandu Purnama;</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Kegiatan lebih dari 8 kali</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Kader lebih dari 5 orang</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % :</p> <p style="padding-left: 40px;">- KIA</p> <p style="padding-left: 40px;">- KB</p> <p style="padding-left: 40px;">- Imunisasi</p> <p style="padding-left: 40px;">- Gizi</p> <p style="padding-left: 40px;">- Pencegahan dan Penanggulangan Diare</p> <p style="padding-left: 20px;">d. Ada Dana sehat</p> <p>19. RW Siaga Bencana/ Siaga Bencana;</p> <p>20. Siskaling Aktif</p> <p><b>% PKK Unggul</b> <b>Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan</b></p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p><b>RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK</li> <li>2. Melaksanakan Sosialisasi Tenologi Tepat Guna</li> <li>3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan</li> <li>4. Sosialisasi/pembinaan bina keluarga</li> <li>5. Sosialisasi ketertiban lingkungan</li> <li>6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</li> <li>7. Koperasi PKK</li> <li>8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah</li> <li>9. Pembinaan Posyandu</li> </ol> <p><b>% Karang Taruna Unggul Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p>
--	--	--	--	--	--	--

**RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023**  
**KECAMATAN COBLONG**

							<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna</li> <li>2. Membentuk dan melaksanakan Kagana (Kesos)</li> <li>3. Melakukan pelatihan UED SP</li> <li>4. Melakukan sosialisasi TTG</li> <li>5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah</li> <li>6. Pendataan PMKS dan PSKS (kesos)</li> <li>7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana (Kesos)</li> <li>8. Event Olah raga (Kesos)</li> <li>9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan)</li> </ol>
							<p><b>% LPM UNGGUL</b> <b>Kriteria LPM Unggul Minimal 60</b> <b>% kegiatan anggaran</b> <b>Pemberdayaan LPM untuk</b> <b>mendukung tercapainya</b> <b>Program Kerja Walikota dan</b> <b>RPJMD Kota Bandung dengan</b></p>

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

						<p><b><i>jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan RW siaga</li> <li>3. Melaksanakan BBGRM</li> <li>4. Pendataan profil kelurahan</li> <li>5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan</li> <li>6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan)</li> <li>7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna.</li> <li>8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	---

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Coblong**  
**Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	91,97	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	<p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW</li> <li>9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li> <li>10. Sosialisasi Urban Farming</li> <li>11. Sosialisasi ODF</li> <li>12. Taman Tematik ramah disabilitas</li> <li>13. Bandung Tanginas</li> <li>14. Penguatan Kelembagaan</li> <li>15. Kelompok Lansia Sehat</li> <li>16. Fasilitasi posyandu lingkup RW</li> </ol>

**RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023**  
**KECAMATAN COBLONG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 23. Melakukan pelatihan UEP 24. Pendataan PMKS dan PSKS 25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 26. Event Olah Raga 27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 30. Pendataan Profil Kelurahan 31. Rembug Warga/Pra Musrenbang 32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Coblong	Persentase siskamling RW Aktif	%	65		Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kriteria Siskamling Aktif : 6. Adanya Pengurus 7. Adanya Kelompok Siskamling 8. Adanya Jadwal Siskamling 9. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 10. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Coblong	Persentase Kelurahan Unggul	%	69,57		Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab semua Kasi di Kecamatan	<p><b>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</b></p> <p>14. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> <p>15. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> <p>16. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>17. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> </ul>

**RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023**  
**KECAMATAN COBLONG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> <li>18. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>19. Septic Tank Komunal (Ekbang)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>20. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</li> <li>21. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> </li> <li>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> </li> <li>11. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</li> </ul>

**RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023**  
**KECAMATAN COBLONG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Coblong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong	Nilai	84,95	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)

## BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Coblong Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota / Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Coblong periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Coblong Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Coblong harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Coblong harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2018-2023.
4. RENSTRA Kecamatan Coblong akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.
5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Coblong tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN COBLONG

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Coblong Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Coblong.

Bandung, 15 Desember 2021  
CAMAT COBLONG



**KRINDA HAMIDIPRADJA, SH., M.Si**

**Pembina TK.I /IVb**

NIP.196803171996031005